

Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan Politik Communication of Woman Legislator

Poetrena Oneal

*Prodi Ilmu Manajemen Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Bandung,
Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116
email: poetrenaoneal@gmail.com*

Abstract. In conducting communication process, women have different ways and habits from men, especially in the implementation of political communication. There are background for why a woman are choosing to go and fight the politics. By those background too women also become a legislator and also doing political communication to fight their first destination becoming a legislator. This research made to know how the Political Communication of Woman Legislator to fight the rights of women labor. Researcher using Qualitative Research Methods with case study approach. Researchers collect, process, and analyze factual data Operating systematic political communication regarding women legislator, so it can be taking relevant conclusion in political issues from the woman legislator, by interviews, observation, and literature study. The interviews were conducted indicated to the people who relates with the research, they are Woman Legislator, The staff of parliament and some people who related with labor union. From the result of the research, Researchers got the forms of political of the Woman Legislator in the process of advocating the right of women labor. Including how the communication message that delivered by woman legislator, how the process of advocating women labor by woman legislator, how the result of advocacy, what media that used in the political communication process and how public opinion is formed by the woman legislator to fight the rights of labor women.

Keywords: Political Communication, Woman Legislator, Woman Labor.

Abstrak. Dalam melakukan proses komunikasi, perempuan memiliki tata cara dan kebiasaan yang berbeda dengan laki-laki, khususnya dalam pelaksanaan komunikasi politik. Ada hal yang melatar belakangi mengapa seorang perempuan pada akhirnya memilih untuk maju dan bertarung dalam dunia politik. Latar belakang itulah yang membuat perempuan pun menjadi seorang legislator dan turut melakukan komunikasi politik untuk memperjuangkan tujuan awalnya menjadi seorang legislator. Penelitian ini akhirnya dilaksanakan untuk mengetahui bagaimana Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Wanita. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan Studi Kasus. Peneliti mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis secara sistematis data faktual mengenai komunikasi politik anggota legislatif perempuan yang diperoleh, sehingga dapat mengambil kesimpulan yang relevan dengan permasalahan politik anggota legislatif perempuan, dengan cara melakukan wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang berkaitan dengan dengan penelitian yaitu Anggota DPR-RI Perempuan, Staff ahli Anggota DPR dan beberapa orang yang berkecimpung dalam serikat buruh. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memperoleh bentuk komunikasi politik apa saja yang digunakan Anggota Legislatif Perempuan dalam proses pembelaan terhadap hak-hak Tenaga Kerja Wanita. Diantaranya adalah bagaimana pesan komunikasi yang disampaikan oleh Anggota Legislatif Perempuan, bagaimana proses pendampingan Tenaga Kerja Wanita yang dilakukan oleh Anggota Legislatif Perempuan tersebut, bagaimana hasil pendampingan yang dilakukan oleh Anggota Legislatif Perempuan tersebut, apa saja media yang digunakan dalam proses berkomunikasi politik dan bagaimana opini publik yang terbentuk dari hasil perjuangan Anggota Legislatif Perempuan yang memperjuangkan Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Anggota Legislatif Perempuan, Tenaga Kerja Wanita

A. Pendahuluan

Semakin maraknya fenomena kekerasan yang didapatkan oleh pahlawan devisa alias Tenaga Kerja Indonesia dan Tenaga Kerja Wanita yang berjuang sekuat tenaga menghidupi kehidupannya dengan menjadi asisten rumah tangga di negeri seberang menimbulkan rasa iba. Perjuangan mereka dalam mengais rejeki tak pelak membuat hidup mereka bahagia.

Karena faktor-faktor di atas, yaitu kekerasan yang diterima oleh Tenaga Kerja Wanita yang membutuhkan pendampingan dari Anggota Legislatif Perempuan, maka penulis tertarik untuk meneliti mengenai “Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan”. Karena dengan melakukan komunikasi politik yang tepat dan efisien peran dan fungsi akan lebih dapat diterima dan disenangi oleh masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: “Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan”. Selanjutnya, tujuan dalam penelitian ini diuraikan dalam pokok-pokok sbb:

1. Untuk mengetahui komunikasi politik Legislator Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Wanita.
2. Untuk mengetahui tanggapan pemerhati Tenaga Kerja Wanita terhadap komunikasi politik Anggota Legislatif Perempuan dalam memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Wanita

B. Landasan Teori

Komunikasi politik menurut Sastroatmodjo (1995 : 63) memiliki lima fungsi dasar, yakni :

1. Memberikan informasi kepada masyarakat apa yang terjadi di sekitarnya.
2. Mendidik masyarakat terhadap arti dan signifikansi fakta yang ada.
3. Menyediakan diri sebagai platform untuk menampung masalah-masalah politik sehingga bisa menjadi wacana dalam membentuk opini publik, dan mengembalikan hasil opini itu kepada masyarakat.
4. Membuat publikasi yang ditujukan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga politik.
5. Dalam masyarakat yang demokratis, maka media politik berfungsi sebagai saluran advokasi yang bisa membantu agar kebijakan dan program-program lembaga politik dapat disalurkan kepada media massa.

Komunikasi politik tidak hanya sekedar membahas tentang pesan-pesan politik yang disampaikan, namun membahas bagaimana komunikasi dapat berlangsung akan suatu sistem politik atau sistem pemerintahan yang mencakup pembahasan-pembahasan bagaimana sistem itu dapat dipertahankan dan dapat berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya (Hikmat, 2010 : 35).

Dalam peradaban dunia seperti ini, kaum perempuan menemukan situasi yang amat berbeda dengan dunia tradisional. Dalam dunia tradisional, insan perempuan dapat bekerja sambil bersenda gurau bersama keluarga dan tetangganya. Adapun dalam alam industrialisasi, perempuan banyak bergaul dengan mesin-mesin modern yang bising dan memekakkan telinga. Dinamika pola kerja mereka berubah. (Sujarwa, 2001: 89).

Ada dua kegiatan yang paling penting dalam kepentingan politik wanita, dua kepentingan tersebut di bidang pendidikan dan pekerjaan (Izzat, 1997: 20). Ada fakta menarik yang dipaparkan Lovenduski (2005) yang ia catat dari penelitian Barbara Nelson dan Najma Chudowry dalam keterwakilan perempuan di 30 negara. Mereka menemukan fenomena menarik bahwa kaum perempuan lebih mungkin memperoleh

kekuasaan ketika partai-partai politik seang tidak aktif atau berantakan, selama rezim besar sedang bergolak. (Soetjipto, 2012: 10)

Pekerjaan sebagai legislator memang sangat erat dalam dunia stereotip maskulinitas. Didalamnya dibutuhkan sifat kepemimpinan, objektivitas, keaktifan, hingga kelogisan argumentasi yang ingin diutarakan. Namun, perempuan juga dapat memperoleh keuntungan dalam situasi-situasi feminisme dan bila dia unggul dalam kegiatan-kegiatan maskulin. (Sears; Freedman; Peplan, 1994 : 203).

Opini publik itu identik dengan pengertian kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam penulisan. Dengan kata lain, opini publik itu merupakan efek dari kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan Pelaksanaan Komunikasi Politik Rieke Diah Pitaloka dalam Memperjuangkan Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita

Karena perjuangan Rieke Diah Pitaloka dalam memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Wanita ini dilatar belakangi oleh rasa empatinya terhadap kaum perempuan yang menjadi buruh migran, beliau menyebutkan bahwa mayoritas para buruh migran Indonesia sebanyak 70% yang bekerja diluar negeri mayoritas adalah pekerja rumah tangga. Dan mayoritas dari tenaga kerja kita itu 80% nya adalah perempuan yang masuk dalam wilayah kerja 3 D (*Dirty, Danger, Difficult*). Dan hampir tiap beberapa bulan, Rieke dan Aparat terkait harus banyak mengembalikan perempuan-perempuan yang tidak bernyawa kembali ke keluarganya.

Ketika ditanya mengapa para Tenaga Kerja Wanita tersebut mau pergi ke luar negeri hanya demi upah yang jika dirupiahkan sekitar tiga sampai empat juta, para Tenaga Kerja Wanita tersebut menjawab keberangkatan mereka adalah faktor keterpaksaan akibat kemiskinan. Jawaban Tenaga Kerja Wanita inilah yang akhirnya menjadi salah satu alasan bagi Rieke Diah Pitaloka untuk memperjuangkan nasib mereka dengan slogan atau jargon yang dinamainya Tiga Layak Buruh Pekerja: Kerja Layak, Upah Layak, dan Hidup Layak. Slogan atau jargon ini yang menjadi tujuan perjuangan Rieke Diah Pitaloka dalam memperjuangkan hak-hak serta harkat dan martabat Tenaga Kerja Wanita.

Dalam hal ini, komunikasi politik yang dilakukan Rieke Diah Pitaloka berbentuk pembicaraan pengaruh, karena advokasi dan pendampingan yang dilakukan Rieke Diah Pitaloka dalam memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Wanita memiliki *goal* berupa perbaikan kebijakan pemerintah guna mengangkat harkat dan martabat para Tenaga Kerja Wanita tersebut.

Komunikasi yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka dengan menyampaikan *statement* politik di dalam forum di DPR RI, rapat umum, pertemuan dengan pemangku kepentingan (Tenaga Kerja Wanita, *Civil Society* maupun Pakar Terkait) maupun dihadapan media massa diharapkan dapat menjadi pengaruh yang dapat menggugah baik pemerintah maupun masyarakat luas untuk lebih memperhatikan hak-hak Tenaga Kerja Wanita yang selama ini lebih sering terabaikan.

Dalam melakukan pendampingan Rieke Diah Pitaloka pastinya melakukan salah satu maupun beberapa gaya retorik dan persuasif di atas sesuai dengan situasi politik dan kondisi yang sedang terjadi. Dan hasil pendampingan yang dilakukan pun beberapa diantaranya membuahkan hasil yang memuaskan, seperti dalam kasus Wilfrida Soik yang akhirnya bebas dari hukuman mati dan kasus Satinah yang akhirnya bebas dari hukuman pancung dengan membayar diyat.

Analisis Tanggapan Pemerhati Tenaga Kerja Wanita terhadap Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan dalam Memperjuangkan Hak-Hak Tenaga Kerja Wanita.

Umpan balik yang disampaikan pemerhati komunikasi politik Rieke Diah Pitaloka tentang dimensi isi dan dimensi hubungan komunikasi politiknya adalah: Secara dimensi isi atau pesan politik, Rieke mengkonsep tujuannya yang dituangkan ke dalam pesan politiknya dengan baik. Dengan jargon yang sering dia kumandangkan berupa Tiga Layak Buruh Pekerja, yaitu: Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak, Rieke ingin mengkomunikasikan bahwasanya seluruh buruh pekerja khususnya Tenaga Kerja Wanita yang bekerja di arena berresiko 3D (*Dark, Dirty and Dangerous*) dapat diangkat harkat dan martabatnya serta mendapatkan proteksi dari pemerintah untuk kelangsungan dan kelayakan hidupnya. Sedangkan secara dimensi hubungan, Rieke Diah Pitaloka menerapkan banyak metode yang sangat variatif. Komunikasi politik yang dilakukan oleh Rieke tidak hanya sebatas *statement* politik di dalam forum dan rapat-rapat DPR, pertemuan dengan pemangku kepentingan dan media massa, tapi juga ikut turun aksi ke lapangan untuk menyuarakan pesan politik yang sedang ia perjuangkan.

Umpan balik yang bersifat langsung dalam kasus komunikasi politik Rieke Diah Pitaloka berupa *feedback* yang masuk ke media yang disediakan oleh Rieke dan timnya, dan pengaduan di posko-posko pengaduan baik manual maupun virtual. Sedangkan umpan balik yang bersifat tidak langsung adalah citra yang ditimbulkan dari komunikasi politik Rieke Diah Pitaloka. Citra Rieke Diah Pitaloka pada akhirnya mempengaruhi kepercayaan khalayak terhadap Rieke, bagaimana sosok politisi ini di mata khalayak apakah hanya sampai tingkat populer (*popularity*), ataukah disukai (*likeability*) atau kompeten untuk dipilih kembali oleh masyarakat (*electability*).

Hasil dari komunikasi politik yang dilakukan oleh politisi wanita ini sudah dapat kita lihat, setelah melakukan komunikasi politik selama satu periode masa jabatannya di Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka membuktikan elektabilitasnya di hadapan publik dengan perolehan suara yang besar pada pemilu legislatif 2014 dan terpilih kembali menjadi Anggota DPR RI periode 2014-2019.

D. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang mengacu pada pertanyaan penelitian dalam kajian yang mengangkat judul mengenai Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan dengan menggunakan metode studi kasus, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Latar belakang Komunikasi Politik Rieke Diah Pitaloka sebagai Komunikator Politik adalah rasa empatinya terhadap kaum perempuan yang menjadi buruh migran, beliau menyebutkan bahwa mayoritas para buruh migran Indonesia sebanyak 70% yang bekerja diluar negeri mayoritas adalah pekerja rumah tangga. Dan mayoritas dari tenaga kerja kita itu 80% nya adalah perempuan yang masuk dalam wilayah kerja 3 D (*Dirty, Danger, Difficult*). Dan hampir tiap beberapa bulan, Rieke dan Aparat terkait harus banyak mengembalikan perempuan-perempuan yang tidak bernyawa kembali ke keluarganya. Rieke Diah Pitaloka lantas melaksanakan tugasnya sebagai anggota legislator dengan melakukan advokasi atau pendampingan terhadap Tenaga Kerja Wanita yang hak-haknya terzolimi. Advokasi yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka juga turut melibatkan korban, *civil society*, dan tidak lupa media, karena dengan menggandeng tiga elemen tersebut saat advokasi diharapkan dapat menjadi kontribusi efektif yang dapat menjadi solusi atas masalah hak-hak Tenaga Kerja

Wanita yang sedang diperjuangkan. Advokasi yang dilakukan berkontribusi efektif dan menjadi solusi atas permasalahan ketenaga kerjaan Wanita.

Pesan Politik Rieke Diah Pitaloka seperti salah satunya jargon yang menjadi tujuan perjuangannya disampaikan melalui metode:

- Penyampaian *statement-statement* politik pada saat rapat-rapat di DPR.
- Pertemuan-pertemuan dengan pemangku kepentingan.
- Penyampaian *statement* dalam rapat umum.
- Ikut serta dalam demonstrasi.
- Penyampaian pesan via website, rilis ke media massa, media sosial dan buku.

Pesan politik yang dikomunikasikan oleh Rieke Diah Pitaloka ditujukan khususnya kepada pemerintah selaku pengambil kebijakan dan sasaran utama advokasi kebijakan publik, selanjutnya adalah komunikasi intensif dengan tenaga kerja perempuan dan *civil society* serta para pakar yang terkait sebagai pemangku kepentingan. Akar persoalannya adalah minimnya perlindungan yang diberikan oleh Negara. Oleh karena itu memperkuat peran negara agar benar-benar hadir memberikan perlindungan bagi rakyat dalam hal ini Tenaga Kerja Wanita merupakan hal yang pertama dilakukan.

2. Tanggapan Pemerhati Komunikasi Politik Rieke Diah Pitaloka (Opini Publik) adalah Rieke Diah Pitaloka merupakan sosok yang lantang dalam menyuarakan aspirasi Tenaga Kerja Wanita dan juga seluruh buruh secara keseluruhan. Hal ini dibuktikannya dengan pelaksanaan komunikasi politik dalam beberapa kasus yang menjerat Tenaga Kerja Wanita seperti kasus yang menjerat Satinah, Wilfrida Soik, pemulangan jenazah Tenaga Kerja Indonesia yang telah dieksekusi di negara tempat ia bekerja dan banyak kasus lain yang menjerat Tenaga Kerja Wanita baik di dalam maupun luar negeri.

Proses pendampingan yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka sangat efektif karena melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan dalam proses komunikasinya. Dengan *statement-statement* politik yang dilakukannya di hadapan media, didukung dengan *press release* yang diterbitkan lewat website maupun sosial media menjadikan komunikasi politik yang dilakukan oleh Rieke Diah Pitaloka semakin efektif.

Pesan politik yang disampaikannya dengan aksi dan juga tak lepas dari pengaruh opini publik yang membentuk *popularity* (kepopuleran), *likeability* (ke-disukaan) dan *electability* (elektabilitas) itulah yang akhirnya membentuk citra Rieke Diah Pitaloka di mata publik yang pada akhirnya menjadi tiket bagi Rieke Diah Pitaloka dalam pemilu legislatif tahun 2014 sehingga beliau terpilih kembali sebagai anggota DPR-RI untuk periode 2014-2019.

E. Saran

Saran Teoritis

1. Pada penelitian ini telah menggunakan metode studi kasus, ada baiknya jika ingin meneliti mengenai Komunikasi Politik Anggota Legislatif Perempuan selanjutnya menggunakan metode lainnya, misalnya menggunakan korelasional atau fenomenologi, dengan membandingkan komunikasi politik anggota legislatif perempuan yang lain.
2. Sebaiknya dalam pengembangan ilmu komunikasi tersedia buku khusus yang membahas mengenai komunikasi politik perempuan, karena peneliti merasa kesulitan saat menggunakan buku panduan sebagai referensi penelitian. Dengan adanya buku yang khusus membahas mengenai komunikasi politik khusus perempuan dapat membantu peneliti selanjutnya untuk lebih mengetahui mengenai komunikasi politik perempuan, karena perempuan memiliki karakter dan kepribadian tersendiri dalam menyampaikan pesan komunikasinya.

Saran Praktis

Seorang legislator memang berfungsi sebagai pengontrol pemerintah karena sesuai dengan fungsinya sebagai anggota dewan. Semoga Rieke Diah Pitaloka bisa tetap konsisten dalam mengontrol pemerintah dalam memperjuangkan hak-hak Tenaga Kerja Wanita sehingga apa yang dicita-citakan dalam tujuan awal berupa Kerja Layak, Upah Layak dan Hidup Layak dapat terlaksana sepenuhnya. Selain itu diharapkan pergerakan yang dilakukan dapat lebih cepat sehingga tidak ada lagi Tenaga Kerja Wanita yang ketika pulang ke Indonesia tinggal jenazahnya saja karena proteksi yang tidak baik atau keterlambatan pendampingan dari pihak yang terkait.

Daftar Pustaka

- Hikmat, Mahi. M. 2010. *Komunikasi Politik*, Bandung: PT. Simbiosis Rekatama Media.
- Sujarwa. 2001. *Polemik Gender: Antara Realitas dan Refleksi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Izzat, Hibah Rauf, 1997. *Wanita dan Politik Pandangan Islam*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Nimmo, Dan. 1989. *Komunikasi Politik: Khalayak dan Efek*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Sastroatmodjo, Sudjono. 1995. *Perilaku Politik*. Semarang: IKIP Semarang Press
- Sears, David O, 1994, *Psikologi Sosial*, Jakarta: Penerbit Erlangga
- Soetjipto, Ani W & Shelly Adelina. 2012. *Partai Politik dan Strategi Gender Separuh Hati: Pelajaran dari Tiga Partai Pemenang Pemilu 2009*, Jakarta: Parentesis Publisher.
- Sudarmansyah, dkk. 2013. *Peran Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dari Fraksi PDI Perjuangan Dalam Menyalurkan Aspirasi Konstituen di Kabupaten Kubu Raya*. Jurnal Tesis PMIS-UNTAN-PSIP.